



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 7/2/1/2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Gorontalo Tahun 2026, dengan rincian Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo Tahun 2026.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 JANUARI 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 7 / 2 / 1 / 2026

TANGGAL : 8 JANUARI 2026

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026.

A. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR AJUAN PERANGKAT DAERAH

NO	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO	PELAKSANAAN	PENGUSUL
1	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2030	Pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	BAPPPEDA
2	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan ketentuan Pasal 3, Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.	BAPPPEDA
3	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	Pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	BAPPPEDA
4	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	BAPPPEDA
5	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2027	Pelaksanaan Ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPPEDA

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



6	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Pelaksanaan Ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
7	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Rancangan Peraturan Gubernur tentang pemberian bantuan Bagi Pelaku USAHA Mikro Kecil dan Menengah dan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 71 huruf b, dan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
9	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan	Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (3) , Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (8), Pasal 19 ayat (9), Pasal 24 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan.	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
10	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan	Pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan.	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
11	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (5), Pasal 20 ayat (6), Pasal 28 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah.	Pelaksanaan ketentuan Pasal 19, Pasal 49 ayat (5), Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



13	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengarustamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
----	---	---	---

B. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KUMULATIF TERBUKA

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO	PELAKSANAAN	PENGUSUL
1	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026	Tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	Badan Keuangan
2	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026	Tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	Badan Keuangan
3	Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025	Tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	Badan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR GORONTALO


GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

